

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMAPOLO



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2021



Jalan Raya Jumapolo
Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia yang diberikan sehingga dapat terselesainya salah satu kegiatan pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumapolo Tahun Anggaran 2021.

Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumapolo Tahun Anggaran 2021 secara umum berisi tentang program, kegiatan, dan hasil yang dicapai serta inventarisasi permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dikandung maksud sebagai bukti administrasi Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati dan sekaligus merupakan dokumen yang sangat berguna dalam rangka penyusunan program dan kebijakan di tahun berikutnya.

Tersusunnya laporan ini berkat kerja sama dan koordinasi berbagai pihak. Untuk itu melalui media ini kami sampaikan rasa terima kasih teriring doa semoga atas budi baik yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kami menyadari Laporan pelaksanaan Tugas ini sudah barang tentu banyak kekurangan dan kesalahan, karena terbatasnya kemampuan, kritik membangun sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Jumapolo, Januari 2022

CAMAT JUMAPOLO,

Drs. MURSENO.
Pembina Tk.I
NIP. 19650102 199302 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	1
BAB II DISKRIPSI SKPD	3
A. Visi, Misi, Unit Kerja	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	6
D. Kepegawaian	7
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	10
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	10
C. Urusan Pilihan	10
D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	10
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	11
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	11
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	11
C. Urusan Pilihan	11
D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	11
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	20
A. Tugas yang diterima	20
B. Tugas yang diberikan	20
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	21
A. Kerja sama antar daerah	21
B. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga	21
C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah	21
D. Pembinaan Batas Wilayah	21
E. Pencegahan dan penanggulangan bencana	21
F. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	23
BAB VII PENUTUP	24
1. Kesimpulan	24
2. Saran	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, sehingga berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Kecamatan di Wilayah Kerja Kabupaten Karanganyar, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar yang ditindaklanjuti pula dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai petunjuk pelaksanaan operasionalnya.

Atas dasar landasan yuridis tersebut, maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumapolo Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu pemenuhan kewajiban administratif.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas ini berdasarkan pada :

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar;
- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
- c. Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2019 – 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Unit Kerja merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD Kecamatan Jumapolo yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan SKPD Kecamatan Jumapolo yang dikaitkan dengan Proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud :

1. Sebagai bukti administratif Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati;
2. Sebagai dokumen / bahan acuan dalam rangka penyusunan program dan kebijakan di tahun berikutnya.

b. Tujuan :

1. Evaluasi terhadap program kerja yang telah direncanakan;
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
3. Mengetahui peluang yang bisa dimanfaatkan bagi pencapaian program kerja berikutnya.

BAB II

DISKRIPSI UNIT

KERJA

A. VISI, MISI, UNIT KERJA

Guna mendukung Visi, Misi, dan Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Jumapolo mengimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Jumapolo dengan Visi Kecamatan Jumapolo sebagai berikut : "BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR".

Visi tersebut memiliki makna bahwa pelayanan prima dan segala upaya Pemerintah Kecamatan Jumapolo ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Jumapolo yang sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dirumuskan Misi Kecamatan Jumapolo sebagai berikut :

1. Mewujudkan tertib penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
2. Mewujudkan kepatuhan hukum dan peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan, Desa serta masyarakat guna menciptakan kondisi kerja dan daerah yang mantap;
3. Mewujudkan pelayanan Prima Kepada Pemerintah Desa dan masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana aparat pemerintah;
4. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman dan damai dengan dilandasi toleransi antar umat beragama;
5. Mewujudkan fasilitasi pemberdayaan lembaga - lembaga masyarakat dalam pembangunan desa.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi dari visi dan misi tersebut, maka perlu dilakukan hal -hal sebagai berikut :

1. Peningkatan tertib administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
2. Peningkatan kinerja dan Disiplin PNS sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal;
3. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama sehingga terciptanya kerukunan umat beragama;
4. Peningkatan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari - hari dari tindak kriminal;
5. Peningkatan sistem penyusunan perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa;
6. Peningkatan keberadaan lembaga PKK di Tingkat Kecamatan dan Desa.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat diatur menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 dan juga diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
3. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
4. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar yaitu “Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah”.

D. Standard Operating Procedure (SOP) Kecamatan Jumapolo

SOP Kecamatan Jumapolo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. SOP Tentang Pelayanan non Perijinan KTP, KK, Akte Kelahiran;
- b. SOP Tentang umum SKCK, Pindah Tempat;
- c. SOP Tentang Perijinan ,TDG, IUMK.

E. PERDA/PERBUB YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

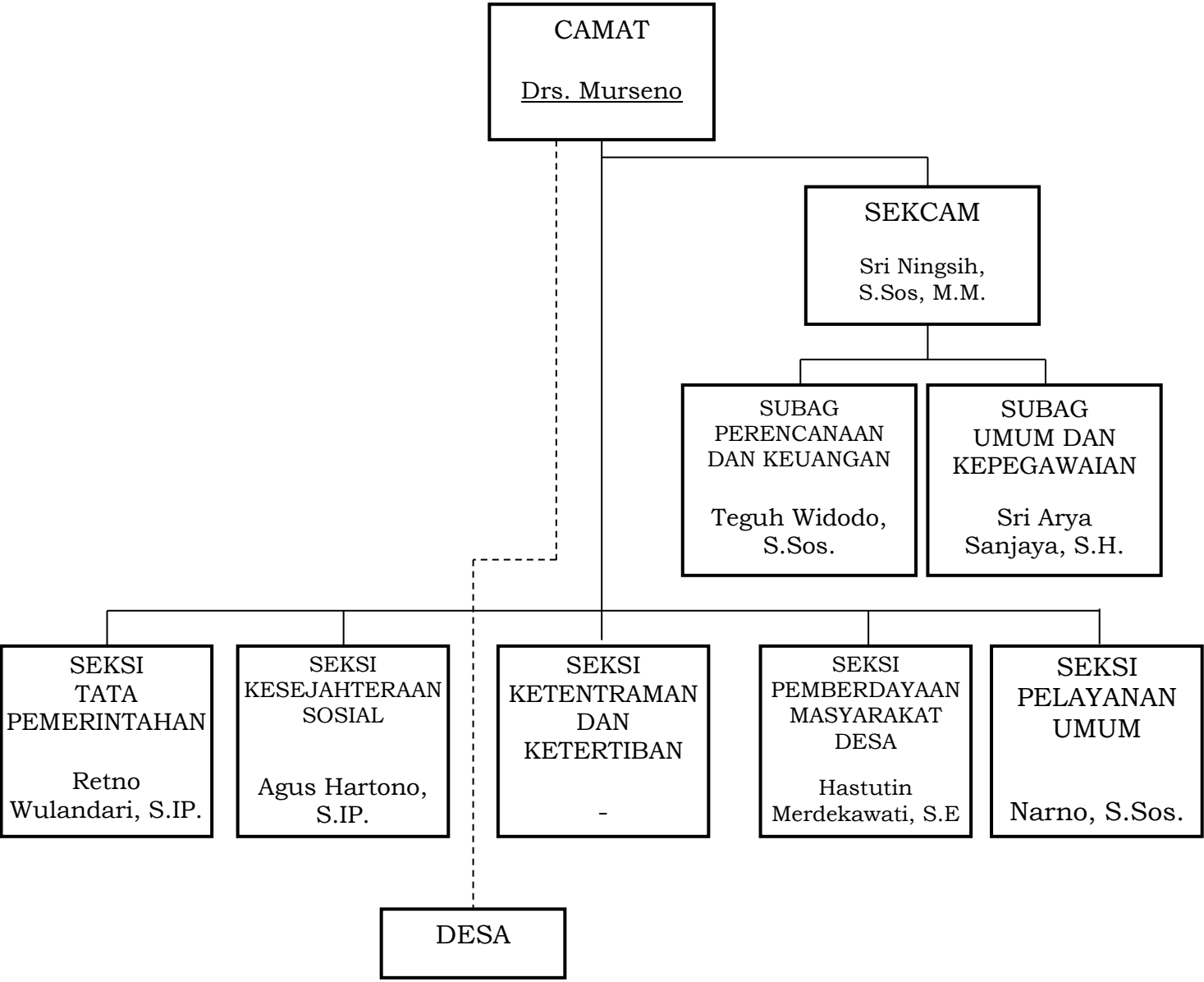
Program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo tertuang dalam DPA Perubahan Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. (beserta perubahannya dicantumkan, perda dan perbup)

F. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan di Wilayah Kerja Kabupaten Karanganyar, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar yang ditindaklanjuti pula dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai petunjuk pelaksanaan operasionalnya. Struktur organisasi Kecamatan Jumapolo terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi;
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JUMAPOLO
BERDASARKAN PERDA NO. 4 TAHUN 2009**



Ket : ____Garis Komando
----- Garis Koordinasi

G. KEPEGAWAIAN

Keadaan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Jumapolo keadaan sampai dengan per tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

TABEL I
DAFTAR PEGAWAI SKPD/OPD (KESELURUHAN)

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/CPNS)	PANGKAT/GOL. RUANG
1	Drs. MURSENO	19660102 199302 1 001	PNS	Pembina Tk. I/IV.b
2	SRI NINGSIH, S.Sos, M.M	19670523 198901 2 002	PNS	Pembina/IV.a
3	HASTUTIN MERDEKAWATI, S.E.	19800817 2010	PNS	Pembina/IV.a
4	AGUS HARTONO, S.IP	19640803 198603 1 019	PNS	Penata TK.I/III.d
5	NARNO, S.Sos.	19630713 199103 1 010	PNS	Penata TK.I/III.d
6	RETNO WULANDARI, S.IP.	19770707 200604 2 058	PNS	Penata TK.I/III.d
7	SRI ARIYA SANJAYA, S.H	19840610 201001 1 028	PNS	Penata/III.c
8	TEGUH WIDODO, S.Sos	19760817 200701 1 013	PNS	Penata Muda/III.a
9	ERFIANTO DWI PRASETYO, S.H	19811112 200604 1 011	PNS	Penata Muda Tk.I/III.b
10	SUHARTINI	19780430 200312 2 007	PNS	Pengatur Tk.I/II.d
11	SUPARNO	19670315 200701 1 027	PNS	Pengatur Tk.I/II.d
12	AGUNG SULARDI	19771028 200701 1 009	PNS	Pengatur/II.c
13	SUTARDI	19680315 200701 1 051	PNS	Pengatur/II.c
14	IRAWAN TEJO NUSANTORO	19730308 201001 1 002	PNS	Pengatur Muda/ II.a
15	SUHARTINI	19780430 200312 2 007	PNS	Pengatur Tk.I/II.d

TABEL II
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL KECAMATAN JUMAPOLO

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI PERSYARATAN KEPANGKATAN
1.	Drs. MURSENO	Camat	Memenuhi	Memenuhi
2.	SRI NINGSIH, S.Sos, M.M	Sekretaris Camat	Memenuhi	Memenuhi
3.	HASTUTIN MERDEKAWATI, S.E	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Memenuhi	Memenuhi
4.	NARNO, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	Memenuhi	Memenuhi
5.	AGUS HARTONO, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial	Memenuhi	Memenuhi
6.	TEGUH WIDODO, S.Sos	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Memenuhi	Memenuhi
7.	RETNO WULANDARI, S.I.P	Kasi Tata Pemerintahan	Memenuhi	Memenuhi
8.	TEGUH WIDODO, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Memenuhi	Memenuhi
9.	SRI ARYA SANJAYA, S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Memenuhi	Memenuhi

TABEL III
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL YANG BELUM TERISI

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	NIHIL	

TABEL IV
DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL SKPD (
umum/khusus)

N O	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
	NIHIL		

TABEL V
DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL SKPD YANG BELUM
TERISI
(umum/khusus)

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	
	NIHIL		

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 629.900,00 Persentase: (69,99%)	Dokumen RENJA OPD 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 892.500,00 Persentase: (99,17%)	Dokumen RKA OPD 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		

			3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 795.000,00 Persentase: (88,33%)	DPA OPD 100 %	100 % (100.00%)		
			4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 750.900,00 Persentase: (83,43%)	Dokumen LKJIP OPD 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.808.506.000,00 Realisasi: Rp. 1.707.069.455,00 Persentase: (94,39%)	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang	19 Orang (100.00%)		
		c. Administrasi Umum	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 4.500.000,00 Realisasi: Rp. 4.435.000,00 Persentase: (98,56%)	Terbayarnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 8.500.000,00 Realisasi: Rp. 5.900.000,00 Persentase: (69,41%)	Terbayarnya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2 Kegiatan	2 Kegiatan (100.00%)		
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.975.000,00 Persentase: (99,38%)	Terbayarnya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 12.000.000,00 Realisasi: Rp. 10.513.500,00 Persentase: (87,61%)	Terbayarnya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 7.020.000,00 Realisasi: Rp. 7.020.000,00 Persentase: (100,00%)	Terbayarnya Barang Cetak Dan Penggandaan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya Bahan Bacaan	12 Bulan (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 2.280.000,00 Realisasi: Rp. 1.920.000,00 Persentase: (84,21%)	dan Peraturan P erundang- undangan 12 Bulan			
				7) Fasilitas Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 17.980.000,00 Realisasi: Rp. 11.165.000,00 Persentase: (62,10%)	Terbayarnya jamuan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 925.000,00 Persentase: (18,50%)	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 19.720.000,00 Realisasi: Rp. 19.100.000,00 Persentase: (96,86%)	Terbayarnya Komputer dan Laptop 2 Kegiatan	2 Kegiatan (100.00%)		
				2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran:	Terbayarnya Beckdrop Kantor 1 Kegiatan	1 Kegiatan (100.00%)		

				Rp. 15.200.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (98,68%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 800.000,00 Realisasi: Rp. 800.000,00 Persentase: (100,00%)	Terbayarnya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 22.044.000,00 Realisasi: Rp. 16.477.585,00 Persentase: (74,75%)	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 %	12 Bulan, 100 % (100.00%)		
				3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 84.600.000,00 Realisasi: Rp. 84.599.500,00 Persentase: (100,00%)	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor 5 Orang	5 Orang (100.00%)		

			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 46.000.000,00 Realisasi: Rp. 36.787.400,00 Persentase: (79,97%)	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9 Kendaraan	9 Kendaraan (100.00%)		
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 6.585.000,00 Persentase: (65,85%)	Peralatan dan Mesin Yang Memadai 6 Jenis	6 Jenis (100.00%)		
			g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 500.000,00 Realisasi: Rp. 498.000,00 Persentase: (99,60%)	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
				2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Legalisasi 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 500.000,00 Realisasi: Rp. 425.000,00 Persentase: (85,00%)				
			h. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.920.000,00 Persentase: (78,40%)	Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)		
				2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.769.000,00 Persentase: (97,69%)	Kegiatan PKK Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)		
			i. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 54.000.000,00 Realisasi: Rp. 46.351.000,00	Terwujudnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

				Persentase: (85,84%)				
			j. Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.450.000,00 Persentase: (86,25%)	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah 2 Kegiatan	2 Kegiatan (100.00%)		
				2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Anggaran: Rp. 12.460.000,00 Realisasi: Rp. 6.144.800,00 Persentase: (49,32%)	Fasilitasi Kegiatan FKUB 3 Kegiatan	3 Kegiatan (100.00%)		
			k. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Anggaran: Rp. 4.376.000,00 Realisasi: Rp. 2.881.800,00 Persentase: (65,85%)	Fasilitasi Penyusunan APBDes Dan Perdes 12 Desa	12 Desa (100.00%)		
				2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran:	Pembinaan Administrasi Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)		

	Rp. 1.600.000,00 Realisasi: Rp. 1.269.900,00 Persentase: (79,37%)			
3)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Anggaran: Rp. 41.040.000,00 Realisasi: Rp. 33.174.300,00 Persentase: (80,83%)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Dengan Siskeudes, Fasilitasi Pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi, Dan Bantuan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)	
4)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaran: Rp. 4.800.000,00 Realisasi: Rp. 3.807.300,00 Persentase: (79,32%)	Terselenggarakan Pembinaan Perangkat Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)	

B A B V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Untuk Tugas Pembantuan yang diterima di Kantor Kecamatan tidak ada / nihil.

B. TUGAS YANG DIBERIKAN

Untuk tugas yang diberikan di Kantor Kecamatan tidak ada / nihil.

BAB V I

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Secara umum keadaan ketentraman dan ketertiban serta keamanan selama tahun 2021 di Kecamatan Jumapolo kondusif dan terkendali.

A. KEJASAMA ANTAR DAERAH

Untuk Kerjasama antar daerah di Kecamatan Jumapolo tidak ada/nihil

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Untuk Kerjasama dengan pihak ketiga di Kecamatan Jumapolo tidak ada/nihil

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH

1. FORUM KOORDINASI :
2. MATERI KOORDINASI :
3. INSTANSI VERTIKAL YANG TERLIBAT :
4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN :
5. JUMLAH KEGIATAN KOORDINASI YANG DILAKSANAKAN :
6. HASIL DAN MANFAAT KOORDINASI :
7. TINDAK LANJUT KOORDINASI :
8. HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN : NIHIL

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kecamatan Jumapolo sebagai pintu gerbang masuknya Wilayah Kabupaten Karanganyar dengan batas wilayah :

- Sebelah utara : Kecamatan Jumantono.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatipuro.
- Sebelah Timur : Kecamatan Matesih.

Untuk menjaga keadaan ketentraman, ketertiban serta keamanan wilayah Kecamatan Jumapolo, selalu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan.

Sehubungan dengan kebersihan di sepanjang jalan dimana sebelah selatan masuk Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, selalu dilaksanakan koordinasi dan pembinaan kedua wilayah.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Untuk pencegahan bencana, berdasarkan kalender musim sebelumnya pada musim kemarau rawan kebakaran, kekeringan, dan dalam

menghadapi hari - hari besar, Idhul Fitri, Idhul Adha, Natal, dan tahun baru rawan keamanan sedang pada musim penghujan rawan banjir, pohon tumbang, rawan penyakit.

Dari Pemerintah Kecamatan lewat surat resmi maupun melalui rapat koordinasi diinformasikan kepada Kepala Desa untuk disebarluaskan pada warganya tentang pencegahan terhadap bencana yang biasanya ada ditahun-tahun sebelumnya, antara lain melalui : Kegiatan Prokasih disepanjang jalur aliran sungai, PSN disetiap Rumah Tangga, kewaspadaan adanya bahaya banjir didaerah padat penduduk.

1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGULANGANNYA

Kecamatan Jumapolo terdiri dari 12 desa.

Untuk penanggulangan adanya banjir rutin tersebut, Forkompinca bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, linmas memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk selalu waspada dan tanggap terhadap bencana banjir yang setiap tahun terjadi. Adapun bencana yang terjadi sebagaimana terlampir.

2. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Untuk penanganan bencana mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa bahan makanan dan dari swadaya masyarakat dan perusahaan yang ada di Kecamatan Jumapolo.

3. SKPD yang menangani

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan.

4. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINANBENCANA

Dengan adanya cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, dimungkinkan berpotensi terjadinya bencana. Dari Pemerintah Kecamatan lewat surat resmi maupun melalui rapat koordinasi diinformasikan kepada Kepala Desa untuk disebarluaskan pada warganya tentang pencegahan terhadap bencana yang biasanya ada ditahun-tahun sebelumnya, antara lain melalui : Kegiatan Prokasih disepanjang jalur aliran sungai, PSN disetiap Rumah Tangga, kewaspadaan adanya bahaya banjir di daerah padat penduduk.

5. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI.

Potensi Bencana yang setiap tahun tahun terjadi di Wilayah Jumapolo banjir dan untuk Itu Forkompinca bekerjasama dengan dinas terkait selalu mengingatkan warga untuk waspada terjadinya bencana tersebut.

Setiap terjadi kejadian Kepala Desa pada kesempatan pertama melapor ke Forkompinca, kemudian Forkompinca dan Staf mengecek ke TKP dan melaporkan Kabupaten. Dengan meningkatnya kewaspadaan di masyarakat Wilayah Jumapolo diharapkan apabila terjadi bencana segera dapat ditangani.

6. PENANGANAN KORBAN PASCA BENCANA

Penanganan korban pasca bencana yang dilakukan Forkompinca Jumapolo antara lain :

1. Menyalurkan bantuan yang diterima baik itu dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun swadaya dari masyarakat dan perusahaan yang ada di Wilayah Kecamatan Jumapolo.
2. Bekerja sama dengan puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada korban bencana.
3. Dusahakan relokasi bagi wilayah yang rawan bencana.

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

1. Gangguan yang terjadi;
2. SKPD / OPD yang menangani;
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan;
4. Penanggulangan dan kendalanya;
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan;
6. Sumber dan Jumlah Anggaran

B A B VII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Jumapolo sebagai Perangkat Daerah telah berupaya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, walaupun dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas pula adanya kendala maupun hambatan. Dari pelaksanaan tugas dimaksud secara umum dapat disimpulkan :

1. Antara program kerja yang telah disusun dengan pelaksanaannya tidak semua dapat sesuai. Hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. Adanya satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pembangunan mushola kantor karena anggaran dan waktu tidak mencukupi.
2. Dengan menjalin koordinasi dan menerapkan prinsip efisiensi, Camat berupaya maksimal melaksanakan tugas dan kewajibannya.

B. SARAN

Dari kondisi tersebut, selanjutnya memandang perlu mengajukan saran sebagai masukan dalam menyusun program dan strategi di waktu mendatang kepada Pemerintah Kabupaten sebagai berikut :

1. Alokasi dana yang diberikan kepada masing-masing SKPD sesuai kebutuhan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumapolo Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jumapolo, Januari 2022

CAMAT JUMAPOLO,

Drs. MURSENO.
Pembina Tk.I
NIP. 19650102 199302 1 002